

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan suatu aset yang berharga bagi suatu organisasi. Menurut Sutrisno (2014:3), “Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya rasio, rasa, dan karsa”. Sedangkan Wirawan (2015:18) mengemukakan bahwa “Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang disebut sebagai manajer, pegawai, karyawan, buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk organisasi” .Sumber daya manusia dalam suatu organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan dan menghadapi segala tantangan yang didapatkan selama kegiatan-kegiatan dalam pekerjaannya, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang dimilikinya. Semua tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tidak dapat tercapai apabila tidak ada unsur manusia sebagai penggerak jalannya organisasi.

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia saja, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Sukmaningrum (2012), menyatakan bahwa kompetensi adalah “pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas”. Sedangkan Hutapea dan Thoha (2008:7) mengemukakan bahwa “Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi berarti suatu kemampuan berupa pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan suatu pekerjaan hingga terselesainya tugas.

Kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas pula. Hutapea dan Thoha (2008: 8), mengungkapkan bahwa

ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan perilaku individu.

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan yang meliputi :
  - a. Mengetahui dan memahami pengetahuan di bidangnya masing-masing yang menyangkut tugas dan tanggung jawab dalam bekerja.
  - b. Mengetahui tupoksi organisasi instansi.
  - c. Mengetahui bagaimana menggunakan informasi, peralatan dan teknik yang tepat dan benar.
2. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik dan maksimal. Keterampilan (*Skill*), meliputi :
  - a. Kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik.
  - b. Kemampuan dalam mengatasi masalah.
  - c. Kemampuan menentukan prioritas masalah.
  - d. Kemampuan memberikan informasi pelayanan.
3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sikap kerja, meliputi :
  - a. Mempunyai kreativitas dalam bekerja.
  - b. Adanya semangat kerja yang tinggi.
  - c. Mempunyai kemampuan dalam perencanaan/pengorganisasian.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka organisasi pemerintahan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi, misalnya sumber daya manusia nya harus berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Sehingga, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi akurat, efektif, dan efisien karena dikelola oleh SDM yang berlatar belakang Pendidikan akuntansi (Rahayu, 2014: 3).

### 2.1.2 Penerapan Sistem akuntansi Keuangan daerah

Pramono Hariadi (2010:115) menjelaskan bahwa “sistem akuntansi adalah prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi”.

Sementara itu, menurut Mulyadi (2016:19) pengertian sistem akuntansi adalah sebagai berikut:

Organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan demikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dengan demikian sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur yang dilaksanakan mulai dari input berupa transaksi keuangan, proses berupa analisis transaksi yang dituangkan dalam catatan-catatan atau jurnal, dan output berupa laporan keuangan. (Mulyadi, 2001:3)

Menurut Abdul Halim (2014:42) Akuntansi keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah. Pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, rakyat, analis dan pemerhati pemda, dan pemerintah pusat. (Abdul Halim, 2014:42)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006, yaitu :

“Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. (Permendagri No. 13 Tahun 2006)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sekurang-kurangnya mencakup empat prosedur yaitu:

- 1) **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**  
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.
- 2) **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**  
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.
- 3) **Prosedur Akuntansi Aset Tetap**  
Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, surat keputusan peghapusan barang, surat keputusan mutase barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akutansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.
- 4) **Prosedur Akuntansi Selain Kas**  
Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan pelaksanaan dari pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan yang dijadikan sebagai pedoman penyajian informasi laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan laporan semester dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Kepala daerah menetapkan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada Peraturan daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

### **2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi Kadir dan Triwahwuni (2013). Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, bahkan CD ROM, sedangkan teknologi telekomunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh Kadir dan Triwahwuni (2013). Menurut Wahyudi (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang baik secara garis besar dapat memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Wardani dan Andriyani, 2017).

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

### **2.1.4 Sistem Pengendalian Intern**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern akan memberikan keyakinan dan kepercayaan yang memadai atas kualitas atau keterandalan informasi laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Pengendalian Intern merupakan komponen yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran dan terjaminnya informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku Nurillah dan Muid (2014). Penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan memberikan sebuah keyakinan yang sangat memadai atas kualitas dan keterandalan informasi keuangan, serta akan meningkatnya kepercayaan *stakeholders* (Surastiani dan Handayani, 2015).

### **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan

merupakan tindakan pragmatis, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah harus dievaluasi dalam hal manfaat laporan tersebut terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan serta mudahnya laporan keuangan tersebut dipahami oleh pemakai (Mardiasmo (2018: 199). Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bagian dari proses pelaporan keuangan di mana pemerintah daerah disusun untuk menyajikan posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh badan pemerintah daerah (Suwanda, 2015: 143).

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan. Laporan keuangan pemerintah harus disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, sehingga bermanfaat atau dengan kata lain, informasi tersebut harus mempunyai nilai (Suwardjono 2005). Pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan dalam menggunakan laporan keuangan tersebut, misalnya untuk pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik (Wati, 2014).

#### **2.1.5.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah**

Tujuan pembuatan laporan keuangan yaitu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan pemerintah menurut Mardiasmo (2018:201) secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan;
2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif;
3. Perencanaan dan informasi otorisasi;
2. Kelangsungan organisasi;
5. Hubungan masyarakat;
6. Sumber data dan gambaran.

Secara rinci dan spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah terdapat dalam PP No. 71 tahun 2010 yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2018:205), secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang di syaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:



- a. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain.
- b. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah.
- c. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target; dan
- d. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

### 2.1.5.3 Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah

Kinerja dan akuntabilitas suatu daerah dapat diketahui berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan pada daerah tersebut. Apabila suatu daerah memiliki laporan keuangan yang baik, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kinerja dan akuntabilitas yang baik pula. Kualitas laporan keuangan pemerintah dapat dilihat berdasarkan karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 tahun 2010). Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

#### 1. Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik  
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif  
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu  
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan,

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang uraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneiti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Pebedaan/ persamaan
1.	As Syifa Nurillah (2014)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok.	Variabel Independen - Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) - Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X2) - Teknologi Informasi (X3) - Sistem Pengendalian Intern(X4) Variabel Dependen -Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	Persamaan: 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 3. Teknologi Informasi 2. sistem Pengendalian Intern 5. kualitas Laporan keuangan  Perbedaan : Tempat penelitian
2.	Irene Fransisca Ponamon (2014)	Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan	Variabel Independen - Pengawasan Internal (X1) -Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan (X2) - Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3) Variabel	1. Diketahui bahwa secara parsial variabel Pengawasan Internal (X1), memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) 2. Secara parsial, Pemahaman Sistem	Persamaan : - Sistem Akuntansi Keuangan (X2) - Sumber Daya Manusia (X3) -Kualitas Laporan Keuangan (Y)

		pemerintah daerah pada SKPD Kota Manado	Dependen - Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	Akuntansi Keuangan (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y). 3. Secara parsial, berbeda dengan variabel pengawasan internal dan pemahaman sistem akuntansi keuangan yang memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, untuk variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X3) memiliki pengaruh negatif terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	Perbedaan : - Pengawasan internal (X1)
3.	Lusi Novita Sari (2014)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci)	Variabel Independen - Kapasitas Sumber Daya Manusia (X1) - Peran Auditor Internal Pemerintah (X2) Variabel Dependen - Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci. 2. Peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.	Persamaan: - Sumber Daya Manusia (X1) - Kualitas Laporan Keuangan (Y) Perbedaan: - Peran Auditor Internal Pemerintah (X2)
2.	Ni Made Sudiarianti I Gusti	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, pada	Variabel Independen - Kompetensi Sumber Daya	Kompetensi SDM berpengaruh positif pada penerapan SPIP, SAP dan	Persamaan : - Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)

	Ketut Agung Ulupui I G.A. Budiasih (2015)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Manusia (X1) - Sistem Pengendalian Intern (X2) - Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (X3) Variabel Dependen - Kualitas Laporan Keuangan (Y)	kualitas LKPD Pemkab Tabanan. Penerapan SPIP dan SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemkab Tabanan Kompetensi SDM berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemkab Tabanan melalui penerapan SPIP dan SAP.	- Sistem Pengendalian Intern (X2) - Kualitas laporan Keuangan (Y)  Perbedaan : - Standar Akuntansi Pemerintah (X3)
5.	Pramudiar ta (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Kabupaten Kendal)	Variabel Independen: - Kompetensi sumber daya Manusia (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3)  Variabel Dependen: nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah (Studi persepsi Kabupaten Kendal) pegawai SKPD di Kabupaten Batang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas Akuntansi	Persamaan : - Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) - Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) - Sistem Pengendalian Intern (X3)  Perbedaan : - Sistem Akuntansi Keuangan (X2)

6.	Sintike Mentari Modo David Paul Elia Saerang Agus Tony Poputra (2016)	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ).	Variabel Independen - Pengawasan Internal (X1) - Pemahaman Peraturan (X2) - Kapasitas SDM (X3) - Penggunaan TI (X4) - Komitmen Organisasi (X5) Variabel Dependen - Kualitas Informasi laporan Keuangan (Y)	1. Pengawasan Internal (X) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) 2. Pemahaman tentang Peraturan (X) berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistic terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y). 3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan secara statistic terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) 2. Penggunaan Teknologi Informasi (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y) 5. Komitmen Organisasi (X4) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	Persamaan : - Sumber Daya Manusia (X3) - Teknologi Informasi - Kualitas Laporan Keuangan (Y)  Perbedaan : - Pengawasan Internal (X1) - Pemahaman Peraturan (X2) - Komitmen Organisasi (X5)
----	--	---	--	--	--

7.	Niftahudin (2016)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada skpd Kabupaten Indragiri Hilir)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman Akuntansi (X1)</li> <li>- Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X2)</li> <li>- Teknologi Informasi (X3)</li> </ul> <p>Variabel Dependen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas Laporan Keuangan (Y)</li> </ul>	<p>1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variable pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Indragiri hilir</p> <p>2. sistem akuntansi keuangan pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir.</p> <p>3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Akuntansi Keuangan (X2)</li> <li>- Teknologi Informasi (X3)</li> <li>-Kualitas Laporan Keuangan (Y)</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pemahaman Akuntansi (X1)</li> </ul>
8.	Ranny Hanaffi (2017)	Factor – Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati)	<p>Variabel Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1)</li> <li>- Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X2)</li> <li>- Peran Internal Audit (X3)</li> <li>- Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)</li> </ul> <p>Variabel</p>	<p>1.Pemahaman SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah</p> <p>2.Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi Sumber Daya Manusia(X4)</li> <li>-Kualitas Laporan Keuangan (Y)</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pemanhamaan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)</li> <li>- Pemanfaatan</li> </ul>

			Dependen - Kualitas Laporan Keuangan (Y)	3.Peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2.Kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,	Sistem Informasi Akuntansi (X2) -Peran Internal Audit (X3)
9.	Novtania Mokoginta, Linda Lambey dan Winston Pontoh (2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Variabel Independen - Sistem Pengendalian Intern (X1) - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) Variabel Dependen - Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. 2. penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	Persamaan : - Sistem Pengendalian Intern (X1) - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) - Kualitas Laporan Keuangan (Y)
10.	Teguh Erawati, Muhammad Firas Abdulhadi (2018)	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta)	Variabel Independen - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) - Kapasitas Sumber Daya Manusia (X2) - Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) Variabel Dependen - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	1.Pemahaman sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 2.Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah 3. Pemanfaatan teknologi	Persamaan: - Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) - Sumber Daya Manusia (X2) - Pemanfaatan Teknologi Informasi -Kualitas Laporan Keuangan (Y)  Perbedaan : -Sistem pengendalian



			Daerah (Y)	berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Pemahaman sistem akuntansi, kapasiata sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi berpengaruh simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah	intern (X4)
--	--	--	------------	---	-------------

*Sumber : Data yang diolah, 2019*

Ranny Hanaffi (2017) melakukan penelitian tentang Factor – Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Pati). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman SAP berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah, peran internal audit berpengaruh positif signifikan, kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pramudiarta (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah (Studi persepsi pegawai SKPD di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi, sedangkan pemanfaatan teknologi

informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

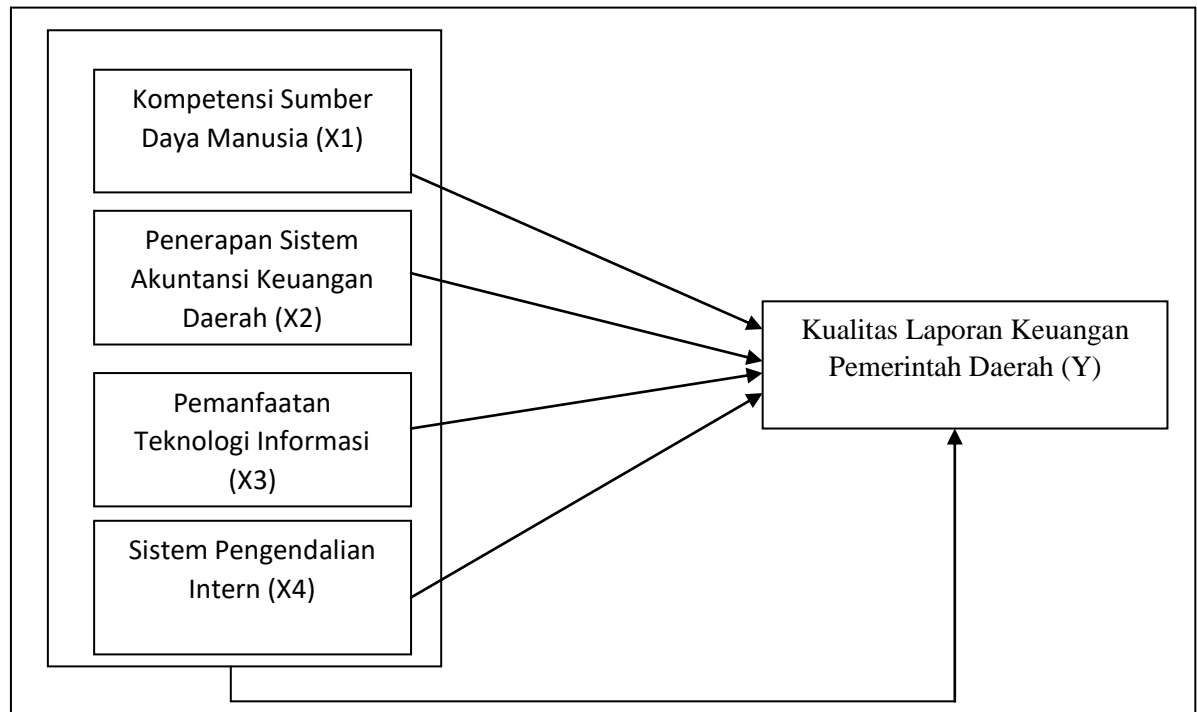
Irene Fransisca Ponamon (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Manado hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Akan tetapi secara parsial, untuk variabel kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Nurillah (2014) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Depok). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir diatas dimana pada penelitian ini kompetensi sumber daya manusia, Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern, sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurillah (2014) terletak pada objek penelitian dengan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang menjadi objek pada penelitian ini.

### a. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : Data yang diolah, 2019

**Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem Pengendalian Intern, secara parsial maupun simultan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten Empat Lawang.

### 2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H4 : Diduga terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H5 : Diduga terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah